

Dinamika Pengelolaan Pendidikan dalam Sistem Desentralistik

Rizki Kurniawan¹, Riswan², Cecep Hilman³

^{1,2}Mahasiswa Pascasarjana Institut Madani Nusantara Sukabumi, Indonesia

³Dosen Pascasarjana Institut Madani Nusantara Sukabumi, Indonesia

E-mail: akungrizki165@gmail.com, riswanhasansadzili@gmail.com, cecephilman77@gmail.com

Article History: Received: 2022-10-22 || Revised: 2022-11-26 || Published: 2022-12-29

Sejarah Artikel : Diterima: 2022-10-22 || Direvisi: 2022-11-26 || Dipublikasi: 2022-12-29

Abstract

The low quality and quality of education in the regions is caused by the lack of uniform access and equal distribution of education system so that it demands the existence of improvements in the arrangement and management of education that is able to raise human dignity and status. In general, various weaknesses are found in the centralization of education such as: (1) Education Financing Capability; (2) Education Quality Gap; (3) Efficiency of education management; (4) Equity Opportunity to Get Education; (5) Educational Institutional Arrangement; (6) Local Content Learning; (7) Increasing Community Participation (8) Setup Government institutions in the field of education. Overview of educational problems above, changes are required in order to improve the quality of education, namely: decentralization of education that is able to provide space and opportunities for regions to be able to manage education independently, participatively, autonomously and community involvement in building and developing education.

Keywords: *Decentralization; Education Management.*

Abstrak

Rendahnya mutu dan kualitas pendidikan di daerah disebabkan oleh tidak seragamnya akses dan sistem pemerataan pendidikan sehingga menuntut adanya perbaikan dalam penataan harkat martabat dan derajat manusia. Secara umum ditemukan berbagai kelemahan dalam sentralisasi Pendidikan seperti: (1) Kemampuan pembiayaan pendidikan; (2) Kesenjangan mutu Pendidikan; (3) Efisiensi pengelolaan Pendidikan; (4) Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan; (5) Penataan kelembagaan pendidikan; (6) Pembelajaran Muataan Lokal; (7) Peningkatan peran serta masyarakat; (8) Penataan kelembagaan pemerintah di bidang pendidikan. Gambaran masalah Pendidikan diatas di tuntut perubahan dalam rangka peningkatan kualitas Pendidikan yakni desentralisasi Pendidikan yang mampu mengelola Pendidikan secara mandiri, partisipatif, otonom dan melibatkan masyarakat dalam membangun dan mengembangkan Pendidikan.

Kata kunci: *Desentralisasi; Pengelolaan Pendidikan.*

I. PENDAHULUAN

Ketika undang-undang nomor 22 tahun 1999 disahkan, terjadi perubahan fundamental dalam pendekatan pembangunan dari sentralisasi ke desentralisasi, termasuk desentralisasi pendidikan. Melalui desentralisasi pendidikan diharapkan akan terjadi perubahan signifikan dalam memperkuat pembangunan dunia pendidikan di Indonesia. Artinya, desentralisasi pendidikan diharapkan dapat menjadi instrumen penting dalam menyelesaikan masalah masalah pendidikan nasional seperti masalah relevansi pendidikan, mutu pendidikan dan efisiensi dalam manajemen pendidikan. Perubahan sistem pendidikan di Indonesia telah melalui perkembangan yang panjang, hal ini seiring dengan kondisi bangsa Indonesia. Jauh sebelum Indonesia mencapai kemerdekaan, sistem pendidikan yang berkembang di Indonesia adalah sistem pendidikan tradisional yang disesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Pada awal kemerdekaan, para pendiri republik yang sebagian besar adalah para tokoh pendidikan, memusatkan usahanya untuk membangun sistem pendidikan nasional sebagai pengganti dari sistem pendidikan kolonial yang telah berlangsung lebih dari tiga abad. Sistem pendidikan nasional mulai menampakkan bentuknya

sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 4 tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah.

Desentralisasi adalah merupakan penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai suatu sistem yang dipakai dalam bidang pemerintahan merupakan kebalikan dari sentralisasi, dimana sebagian kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada pihak lain untuk dilaksanakan. Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah ditegaskan bahwa sistem pendidikan nasional yang bersifat sentralistis selama ini kurang mendorong terjadinya demokratisasi dan 2 desentralisasi penyelenggaraan pendidikan. Sebab sistem pendidikan yang sentralisasi diakui kurang bisa mengakomodasi keberagaman daerah, keberagaman sekoah, serta keberagaman peserta didik, bahkan cenderung mematikan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti sebagai objek penulisan. merupakan suatu kumpulan yang terdiri dari fakta-fakta untuk memberikan gambaran yang luas terkait dengan suatu keadaan. Seseorang yang akan mengambil sebuah kebijakan atau keputusan umumnya akan menggunakan data sebagai bahan pertimbangan. Melalui data seseorang dapat menganalisis, menggambarkan, atau menjelaskan suatu keadaan. Di samping itu, data dikumpulkan melalui cara-cara tertentu kemudian diolah menjadi suatu informasi yang jelas dan mudah dipahami setiap orang. Data juga dibutuhkan di dalam berbagai macam keperluan, seperti penjualan, penelitian hingga kependudukan. Data memiliki jenis dan fungsinya masing-masing, hal ini sesuai dengan kebutuhan pengelola data. Secara umum, terdapat dua jenis data yang biasa digunakan dalam penelitian, yaitu data primer dan data sekunder. Kedua data ini digabungkan untuk saling melengkapi dan membantu peneliti dalam mengamati setiap fenomena yang ada. Meski begitu, kedua jenis data ini memiliki ciri-ciri yang cukup berbeda. Data sekunder adalah jenis data tambahan yang biasanya diperoleh dari sumber utama, tetapi sudah melalui sumber kesekian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Realitas pendidikan sentralistik dan desentralistik

Permasalahan utama pendidikan yang dihadapi bangsa Indonesia adalah rendahnya kualitas pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Menyadari hal tersebut dilakukan upaya-upaya perbaikan, salah satunya dengan memberikan otonomi kepada sekolah. Otonomi sekolah atau yang lebih dikenal dengan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) secara resmi telah dimulai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sehingga sampai saat ini telah berjalan lebih kurang 15 tahun sejak awal pelaksanannya. Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 1 ayat (5) dikemukakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kebijakan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom di sini dimaksudkan adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diberlakukannya undang-undang tentang otonomi daerah tersebut membawa perubahan di berbagai bidang kehidupan, termasuk penyelenggaraan pendidikan. Menurut Tim Teknis Bappenas bekerjasama dengan Bank Dunia (Sufyarma, 2003: 83).

Desentralisasi pendidikan diartikan sebagai pelimpahan kekuasaan dan wewenang yang lebih luas kepada daerah untuk membuat perencanaan dan mengambil keputusannya sendiri dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi bidang pendidikan, namun harus tetap mengacu kepada tujuan pendidikan nasional sebagai bagian dari upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional. Desentralisasi pendidikan berbeda dengan desentralisasi bidang pemerintahan lainnya dalam hal praktik. Jika desentralisasi bidang-bidang pemerintahan lain

berada pada pemerintahan di tingkat kabupaten/kota, maka desentralisasi di bidang pendidikan tidak berhenti pada tingkat kabupaten/kota, tetapi sampai pada lembaga pendidikan atau sekolah sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan. Dalam praktik desentralisasi pendidikan, maka dikembangkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) (Hasbullah, 2006: 14-15). Sementara itu, menurut Depdiknas (Zainuddin, 2008: 60-63) fungsi-fungsi yang dapat didesentralisasikan ke sekolah adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan dan evaluasi program sekolah

Sekolah diberi kewenangan untuk melakukan perencanaan sesuai dengan kebutuhannya, misalnya kebutuhan untuk meningkatkan mutu sekolah. Sekolah juga diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, khususnya evaluasi internal atau evaluasi diri.

2. Pengelolaan kurikulum

Sekolah dapat mengembangkan kurikulum, namun tidak boleh mengurangi isi kurikulum yang berlaku secara nasional yang dikembangkan oleh pemerintah pusat. Sekolah juga diberi kebebasan untuk mengembangkan kurikulum muatan lokal. Selain pengelolaan kurikulum, sekolah juga memperoleh wewenang dalam pengelolaan: (a) proses belajar mengajar, (b) ketenagaan, (c) peralatan dan perlengkapan, (d) keuangan, (e) siswa, (f) hubungan sekolah dengan masyarakat, dan (g) iklim sekolah.

Selanjutnya, Agus Wibowo (2013: 128-129) menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan MBS, fungsi-fungsi sekolah yang awalnya dikerjakan oleh pemerintah sebagian didesentralisasikan kepada sekolah untuk dijalankan secara profesional. Hal tersebut berarti terdapat fungsi-fungsi tertentu yang tidak dapat dilimpahkan kepada sekolah sepenuhnya, sebagian masih merupakan porsi kewenangan pemerintah pusat, dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kota/kabupaten, dan sebagian porsi lainnya dilimpahkan ke sekolah. Adapun fungsi-fungsi yang sebagian porsinya digarap oleh sekolah dalam kerangka MBS meliputi: 1) proses belajar mengajar, 2) perencanaan dan evaluasi program sekolah, 3) pengelolaan kurikulum, 4) pengelolaan ketenagaan, 5) pengelolaan peralatan dan perlengkapan, 6) pengelolaan keuangan, 7) pelayanan peserta didik, 8) hubungan sekolah masyarakat, dan 9) pengelolaan iklim sekolah. Dalam MBS, sekolah diberi otonomi yang lebih besar untuk mengelola sumber-sumber daya sekolah yang ada dengan melibatkan warga sekolah dan masyarakat setempat sebagai upaya meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional. Oleh karena itu terjadi perubahan pola manajemen pendidikan dari pola lama ke pola otonomi pendidikan (MBS).

B. Mutu sebagai rekomendasi social

Mutu dalam pendidikan yaitu meliputi mutu input, proses, dan output. Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Sesuatu yang dimaksud berupa sumberdaya dan perangkat lunak serta harapan-harapan sebagai pemandu bagi berlangsungnya proses. Proses pendidikan adalah mengubah sesuatu menjadi sesuatu yang berpengaruh terhadap berlangsungnya proses. Dalam lembaga pendidikan proses yang dimaksud adalah proses pengambilan keputusan, proses pengelolaan kelembagaan, proses pengelolaan program, proses belajar mengajar, dan proses monitoring serta evaluasi. Output pendidikan merupakan kinerja sekolah. Kinerja sekolah yaitu prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses/perilaku sekolah. Kinerja sekolah dapat diukur dari kualitasnya, efektivitasnya, produktivitasnya, efisiensinya, inovasinya, kualitas kerjanya, dan moral kerjanya.

1. Mutu input

Input pendidikan berupa sumberdaya manusia (kepala sekolah, guru, konselor, karyawan, dan peserta didik) dan sumberdaya lainnya (peralatan, perlengkapan, uang, dsb.). Input perangkat meliputi: struktur organisasi sekolah, peraturan perundang-undangan, deskripsi tugas, rencana atau program, dsb. Sedangkan input harapan-harapan berupa visi, misi, tujuan yang ingin dicapai oleh sekolah.

2. Mutu proses

a) Mutu proses pendidikan pertama, sekolah memiliki efektivitas proses belajar mengajar (PBM) yang tinggi. Ini ditunjukkan oleh sifat PBM yang menekankan pada pemberdayaan peserta didik. PBM bukan hanya sekedar memorisasi dan recall, bukan hanya sekedar

penekanan pada penguasaan pengetahuan tentang apa yang di ajarkan, melainkan lebih menekankan pada internalisasi tentang apa yang diajarkan sehingga tertanam dan berfungsi sebagai muatan murni dan hayati, serta dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari oleh peserta didik.

- b) Kedua: sekolah memiliki kepemimpinan peran yang sangat kuat dalam mengkoordinasikan, menggerakkan, dan menyetarakan semua sumber daya pendidikan yang tersedia. Kepemimpinan kepala sekolah merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong sekolah untuk dapat mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolahnya melalui program yang dilaksanakan secara terencana dan bertahap.
- c) Ketiga: sekolah mempunyai lingkungan sekolah yang aman dan tertib. Sekolah telah memiliki lingkungan (iklim) belajar yang aman, tertib dan nyaman sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan nyaman.
- d) Ke empat: sekolah memiliki mempunyai pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif.
- e) Kelima: sekolah memiliki budaya mutu, informasi kualitas harus digunakan untuk perbaikan bukan untuk mengadili atau mengontrol orang, kewenangan harus sebatas tanggung jawab, hasil harus diikuti penghargaan (reward) atau sanksi (punishment), kolaborasi dan sinergi bukan kompetisi harus merupakan basis untuk kerja sama, warga sekolah harus merasa aman terhadap pekerjaannya, atmosfir keadilan harus ditanamkan, imbal jasa harus sepadan dengan nilai pekerjaan, dan warga sekolah harus memiliki sekolah.
- f) Keenam: kebersamaan (teamwork), sekolah memiliki "teamwork" yang kompak, cerdas, dan dinamis. Kebersamaan (teamwork) merupakan karakteristik yang dituntut karena output pendidikan merupakan hasil kolektif warga sekolah, bukan hasil individual. Karena itu budaya kerjasama antar fungsi dalam sekolah, antar individu dalam sekolah, merupakan kebiasaan hidup sehari-hari warga sekolah.
- g) Ketujuh, sekolah memiliki kewenangan untuk melakukan yang terbaik bagi sekolahnya, sehingga dituntut untuk memiliki kemampuan dan kesanggupan kerja yang tidak selalu menggantungkan pada atasan. Untuk menjadi mandiri, telah memiliki sumberdaya yang cukup untuk menjalankan tugasnya.
- h) Kedelapan, sekolah memiliki memiliki partisipasi yang tinggi dari warga dan masyarakat. Partisipasi yang dirasakan warga sekolah dan masyarakat merupakan bagian dari kehidupan. Partisipasi ini dilandasi oleh keyakinan bahwa makin tinggi tingkat prestasi, makin besar rasa memiliki, dengan makin besar rasa memiliki maka makin besar pula rasa tanggung jawab, dan makin besar tanggung jawab, maka makin besar pula tingkat dedikasinya.
- i) Kesembilan, sekolah memiliki keterbukaan (transparansi) manajemen. Keterbukaan atau transparansi dalam pengelolaan merupakan bagian dari indikator karakteristik sekolah yang bermutu. Keterbukaan atau transparansi yang diimplementasikan Blora ditunjukkan dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan, penggunaan, dan kontrol.
- j) Kesepuluh, sekolah sekolah memiliki kemauan untuk berubah (psikologis dan fisik). Perubahan yang diterapkan merupakan suatu perubahan yang menyenangkan bagi semua warga sekolah. Perubahan merupakan peningkatan, baik bersifat fisik maupun psikologis.
- k) Kesebelas, sekolah memiliki evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi belajar secara teratur bukan hanya ditunjukkan untuk mengetahui tingkat daya serap dan kemampuan peserta didik, tetapi yang terpenting adalah bagaimana memanfaatkan hasil evaluasi belajar tersebut untuk memperbaiki dan menyempurnakan proses belajar mengajar disekolah. Oleh karena itu fungsi evaluasi menjadi sangat penting dalam rangka mewujudkan mutu siswa dan mutu sekolah secara keseluruhan dan secara terus menerus merupakan kebiasaan.
- l) Keduabelas, sekolah responsif dan antisipatif terhadap kebutuhan. selalu tanggap/responsif terhadap berbagai aspirasi yang muncul terhadap hal-hal yang bersangkutan dengan peningkatan mutu. Karena itu sekolah selalu membaca lingkungan dan menanggapi secara cepat dan tepat. Bahkan sekolah tidak hanya mampu

menyesuaikan terhadap perubahan/ tuntutan, akan tetapi juga mampu mengantisipasi hal-hal yang mungkin bakal terjadi.

- m) Ketigabelas, sekolah memiliki komunikasi yang baik. telah memiliki komunikasi yang baik terutama antar warga sekolah, dan juga sekolah-masyarakat sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh setiap-setiap warga sekolah dapat diketahui. Selain itu komunikasi yang baik juga akan membentuk teamwork yang kuat, kompak dan cerdas, sehingga berbagai kegiatan sekolah dapat dilakukan secara merata oleh warga.
- n) Keempatbelas Sekolah memiliki akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggung jawaban yang harus dilakukan terhadap keberhasilan program yang telah dilaksanakan. Akuntabilitas ini berbentuk laporan prestasi yang dicapai dan dilaporkan kepada pemerintah, orang tua siswa, dan masyarakat.

3. Problem dalam pengelolaan pendidikan

Upaya pengembangan desentralisasi pendidikan dapat dikatakan telah menjadi fenomena global selama 25 tahun terakhir ini. Fenomena itu terutama dapat diamati di negara-negara sedang berkembang seperti Amerika Latin yang diawali oleh Argentina (1976), Chili (1981), Brasil (1988), Kolombia (1991), Meksiko (1992), Nikaragua (1993), Guatemala (1994), Venezuela (1997), dan pada tahun 1998 Nikaragua dan Meksiko kembali memperkuat deregulasi dan desentralisasi pendidikannya. Di Amerika Serikat, reformasi pendidikan lebih didorong oleh revolusi politik dan tuntutan kemajuan teknologi (Friedman, 1995). Di Eropa Timur, Hongaria melaksanakan desentralisasi pendidikan di tahun 1985 sekalipun hal itu lebih disebabkan oleh masalah politik. Jepang sebagai salah satu negara maju di Asia melakukan deregulasi dan desentralisasi pendidikan tahun 1948 sebagai upaya untuk menjawab tantangan dan kebutuhan proses globalisasi ekonomi. Di Indonesia, upaya implementasi desentralisasi pendidikan mendapat landasan kuat ketika UU No 22 tahun 1999 mengenai Otonomi Daerah disahkan. Undang-undang mengenai Otonomi Daerah ini membawa implikasi yang sangat luas, termasuk di dalamnya perubahan paradigma manajemen pendidikan dari yang sentralistik ke arah desentralistik.

Konteks permasalahan mengenai kebutuhan akan desentralisasi pendidikan yang dialami baik oleh negara-negara yang sedang berkembang maupun negara maju ternyata tidak dapat dilepaskan dari masalah ekonomi, mutu pendidikan, dan perubahan sosial yang terjadi sebagai akibat globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi komunikasi. Bahkan, proses desentralisasi pendidikan terkait erat dengan proses politik. Menurut Fiske (1996), fenomena desentralisasi sekolah merupakan suatu proses politik. Ia melibatkan pergeseran kekuasaan yang berdampak pada pengaruh dan keberlangsungan berbagai kelompok seperti guru. Hasil studi Bank Dunia mengenai desentralisasi pendidikan yang dilakukan di berbagai negara (Fiske, 1996) menunjukkan bahwa pertimbangan ekonomi untuk desentralisasi pendidikan menjadi pertimbangan penting baik dalam rangka peningkatan kesejahteraan ataupun efisiensi pendidikan itu sendiri. Di Jepang, seperti dilaporkan oleh Hiromitsu Muta (2002), konteks deregulasi dan desentralisasi pendidikan didorong oleh kesadaran akan kebutuhan untuk kompetitif di pasar ekonomi global. Di Indonesia, konteks permasalahan desentralisasi pendidikan didorong oleh berbagai masalah yaitu masalah internal dunia pendidikan itu sendiri dorongan dan arus kuat gerakan demokratisasi dan hak asasi manusia, pergeseran sosial yang ditandai oleh situasi crisis-disintegrating-reforming (Ansoff & McDonnell, 1990), dan perubahan paradigma politik pembangunan dari sentralisasi ke desentralisasi melalui otonomi daerah. Indonesia termasuk negara yang masih sangat muda dalam penerapan desentralisasi, yaitu diawali dengan penetapan UU No 2 tahun 1999 tentang otonomi daerah yang memberikan landasan yuridis bagi pendekatan desentralistik dalam pembangunan. Sebagai sesuatu yang baru, masih tampak keragaman dalam mempersepsi desentralisasi itu sendiri. Keragaman persepsi itu terjadi baik pada tataran konseptual maupun implementasinya.

Pada tataran konseptual masih terjadi perdebatan mengenai hakikat dan substansi desentralisasi. Persoalan konseptual dan implementasi tersebut digambarkan oleh McGinn

dan Welsh (1999: 18). Terhadap keempat konsep tersebut McGinn dan Welsh menjelaskan sifat dan kapasitas otoritas yang berbeda. Dekonsentrasi dibatasi pada pergeseran otoritas untuk mengimplementasikan aturan, bukan untuk membuat aturan. Otoritas daerah merupakan organ pemerintah pusat yang melaksanakan kewenangan pusat yang ada di daerah. Delegation diartikan sebagai pendelegasian kewenangan atas masalah-masalah tertentu dari otoritas pusat kepada otoritas daerah. Devolution dimaknai sebagai pengalihan otoritas kepada unit-unit pelaksana lokal. Ketiga konsep tersebut mengandung makna dan substansi yang berbeda dengan privatization yang dimaknai sebagai pengalihan otoritas kepada masyarakat pengguna (stakeholders) untuk merumuskan suatu kebijakan dan mengimplementasikannya secara penuh (McGinn & Welsh, 1999: 18). Batasan yang dikemukakan oleh McGinn dan Welsh tersebut tercermin dalam berbagai wacana mengenai desentralisasi termasuk desentralisasi pendidikan di Indonesia. Pemahaman yang kurang jelas mengenai batasan kewenangan itu sering menimbulkan masalah dalam implementasinya. Permasalahan berikutnya ialah: apakah desentralisasi pendidikan adalah upaya pemberdayaan daerah (Dinas Pendidikan kota atau kabupaten) ataukah pemberdayaan sekolah? Dalam rangka reformasi pendidikan, apakah basis desentralisasi itu ditempatkan di kabupaten dan kota ataukah di sekolah? Basis desentralisasi ini menjadi penting karena akan berimplikasi pada keberhasilan desentralisasi itu sendiri. Pengalaman reformasi pendidikan yang dilakukan oleh banyak negara menunjukkan bahwa basis reformasi dan desentralisasi pendidikan diletakkan di sekolah. Pengalaman tersebut.

Permasalahan desentralisasi pendidikan yang dikemukakan di atas menunjukkan beberapa gejala yang menarik. Pertama, belum terbangun suatu persepsi yang jelas mengenai hakikat desentralisasi pendidikan. Desentralisasi dipahami sebagai penyerahan kewenangan tertentu dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (kabupaten dan kota). Desentralisasi sesungguhnya memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada sekadar pembagian kewenangan. Desentralisasi adalah suatu proses demokratisasi, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak demokrasi setiap warganegara, kemajemukan masyarakat dan kebudayaan, aspirasi dan ekspektasi, serta kapasitas individu ataupun masyarakat dalam membangun dirinya. Wujud dari pengakuan penghormatan itu adalah pemberian kewenangan kepada individu, masyarakat atau daerah untuk membangun dirinya. Proses demokratisasi itu harus nyata dalam bentuk keterlibatan dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan dan implementasi serta tanggungjawab atas implementasi keputusan itu. Dalam konteks desentralisasi pendidikan berbasis sekolah, keterlibatan sekolah dalam pengambilan keputusan mengenai perencanaan dan pengembangan sekolah menjadi sangat penting. Kedua, masih belum jelas substansi desentralisasi pendidikan yaitu otonomi atau kemandirian, baik kemandirian akademik, manajemen, maupun finansial. Kemandirian akademik menunjuk pada kapasitas sekolah menampakkan karakteristik akademik baik program pendidikan, mutu akademik maupun akuntabilitas sosialnya. Karakteristik akademik itu nantinya akan menjadi ciri keunggulan sekolah itu sendiri untuk dapat kompetitif. Kemandirian manajemen menunjuk pada kapasitas sekolah untuk mengelola potensi sumber daya yang dimiliki, mengembangkannya, serta mendayagunakannya sehingga menjadi kekuatan manajemen untuk menghadapi ketidakpastian masa depan. Kemandirian finansial akhirnya menjadi salah satu simpul permasalahan desentralisasi pendidikan. Krisis multidimensi, khususnya krisis ekonomi yang berkepanjangan lebih mempersulit sekolah dalam membiayai insitusinya. Ketiga, gejala menunjukkan bahwa desentralisasi pendidikan belum menyentuh substansi desentralisasi itu sendiri tetapi masih berada pada tataran yuridis formal. Para pengambil kebijakan masih terjebak pada persoalan-persoalan kewenangan setiap tingkatan otoritas dan hubungan antartingkatan sehingga masalah substansial desentralisasi menjadi terabaikan.

4. Dinamika sosial dalam kurikulum

Pada bagian ini pembicaraan akan terarah pada masalah desentralisasi sebagai sistem administrasi, pengembangan kurikulum. Desentralisasi pengembangan kurikulum adalah kegiatan administrasi yang menerapkan pendelegasian kewenangan kepada daerah-daerah

qalam peng'embangan kurikulum sekolah. Hal ini dimaksudkan agar kurikulum tersebut relevan dengan potensi, karakteristik dan kebutuhan peserta didik maupun daerah. Sebagai contoh untuk melaksanakan cara ini, yaitu kewenangan Direktorat Jendral Dikdas mendapat dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah Depdikbud (untuk daerah tingkat I), kepada Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (untuk daerah tingkat II), akhirnya di tingkat sekolch kewenangannya diberikan kepada Kepala Sekolah; dan Guru. Realisasi dari desentralisasi pengembangan kurikulum, dapat berupa pengambilan keputusan tentang kurikulum: beserta saran pendukungnya sesuai dengan potensi, kondisi, kebutuhan dan karakteristik daerah setempat. Sebagaimana dikatakan oleh Mc'Cutcheon dan Taylor bahwa: they have also limited the, range of decisions that can be made"locally about curriculum and materials" (1980:23).

Dengan cara demikian dimungkinkan terjadinya relevansi kurikulum dengan keadaan peserta didik dan daerahnya. Apa.bila kurikulum sekolah dikembangkan seperti di atas (secara desentralisasi), maka pelaksanaan pengambilan keputusan kurikulum clapat dipantau dengan baik, baik mengenai proses pengembangan, implementasi maupun evaluasinya sebab jangkauannya menjadi lebih sempit. Di samping itu, diharapkan terjaga relevansi antara isi kurikulum dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat setempat. Sebagaimana ditegaskan oleh D. Cohen, bahwa: Since curriculum decision m'aking is negotiated i thin the local school context, .the resultant curriculum may be continously .monitored and adjusted to become' more relevant to students and more closely related to the needs and values of the local 'community (1982:10.0). Dengan kata lain, pendekatan administratif dalam pengembangan kurikulum secara" desentralisasi mengacu pada pembuatan keputusan kurikulum berdasarkan lingkungan sekitar sekolah (School Community-based Curriculum Decision Making). Menurut Cohen pendekatan pengembangan kurikulum ini didasarkan pada asumsi', di antaranya:

- a) Curriculum decision making is an ongoing and dynamic process and when school based, it facilitates the monitoring and progressive 'modification of such decisions·according to changing condition;
- b) Smaller localized administrative units. implicit in the curriculum decision-making 'process are likely to be account ble and responsive to local condition, with implementer more personally involved in diagnosing the circumstance (situational analysis) and adapting the curriculum to' them.
- c) Each school and its community is a unique entity, and the curriculum should reflect the unique school context and its com~unity, resulting in curriculum: diversity from school to school (1982:105).

Oleh karena itu, jelas bahwa pengelolaan pengembangan kurikulum yang menerapkan sistem desentralisasi akan menimbulkan perbedaan muatan kurikulum untuk satu sekolah dengan sekolah yang lainnya, baik itu dalam hal materi, media maupun sarana lainnya. Memang seharusnya demikian yang terjadi. Kesesuaian isi 'kurikulum dengan kondisi daerah setempat diharapkan dapat mempermudah peserta didik dalam menyerap materi atau isi kurikulum tersebut ini berarti masyarakat merupakan sumber data dalam penentuan isi kurikulum. Sebagaimana dikatakan oleh Klein yang mengutip pendapat Stratemeyeretal. yang menegaskan bahwa "content is derived from life in a society, or societies. It may emphasize the function of a society, the major activities of social life or the persistent problems of students and humankindu (1978:1168). Dasar dilakukannya pengembangan kurikulum secara desentralisasi adalah bahwa pada hakikatnya pengembangan kurikulum sebagai proses kebijakan. Oleh karena itu, pemerintah pusat maupun lokal harus turut menentukan isi keputusan program pendidikan (kurikulum) dan pelaksanaannya. Dalam pengembangannya pun harus melibatkan berbagai pihak untuk mengadakan "negosiasif tentang: tujuan, materi, media dan komponen lainnya dalam sistem kurikulum itu sendiri.

Dalam konteks pengembangan kurikulum di dalam sistem pendidikan masional di Indonesia, maka masalah penting yang harus diperhatikan adalah upaya agar jangan sampai

pengembangan kurikulum secara desentralisasi tersebut mengantarkan peserta didik memiliki sikap pudar akan kesadaran atas pentingnya kesatuan dan persatuan bangsa. Namun, dengan adanya sistem desentralisasi dalam pengembangan kurikulum tersebut diharapkan dapat membentuk siswa agar memiliki wawasan yang luas sebagai bekal pengembangan potensi daerahnya, mewujudkan budaya bangsa dan memperkuat kemandirian nasional, menumbuhkan kemampuan nasional untuk mengembangkan ilmu dan teknologi, meningkatkan mutu hidup dan lingkungan masyarakatnya, serta menumbuhkan kader penerus perjuangan bangsa dan pembangunan nasional.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Lembaga pendidikan mempunyai komitmen serta kemauan yang keras untuk terus menerus bekerja berdasarkan mutu. Hal tersebut telah terbukti dengan adanya unsur-unsur pencapaian mutu melalui target-target yang sudah ditetapkan. Sekolah melakukan proses mutu terus menerus terbukti dengan mengadakan inovasi-inovasi dan pengembangan program kegiatan sekolah tiap tahunnya melalui pencapaian mutu, yaitu: mutu input, proses, dan output berdasarkan dari masing masing aspek. Sekolah menentukan standar mutu yang harus di capai dari masing masing lini organisasi, hal tersebut dapat terlihat dari visi, misi, tujuan dan program-program pencapaian mutu yang telah ditetapkan sebelumnya guna dijadikan sebagai strategi pemasaran jasa pendidikan.

B. Saran

Untuk sekolah yang menginginkan strategi pemasaran jasa pendidikan melalui mutu hendaknya mengoptimalkan pencapaian mutu input, proses, dan output sesuai dengan 8 SNP. Optimalisasi program pencapaian SKL, pencapaian standar isi, pencapaian standar proses, pencapaian standar tenaga pendidik dan kependidikan, pencapaian standar sarana dan prasarana pendidikan, pencapaian standar pengelolaan sekolah, pencapaian standar pembiayaan pendidikan, pencapaian standar penilaian pendidikan sesuai dengan SNP dan pencapaian pengembangan budaya dan lingkungan sekolah.

DAFTAR RUJUKAN

- Cisara. "Anugrah. Blangkon Dan Kaum Pria Jawa" 16, no. 2 (n.d.): 201.
- Binsardi & Ekwulogo, "International Marketing of British Education: research on the students perception and the UK market, (Journal International emairal marketing intellegensi and planning. Vol. 11 No. 3/ 4. 2003).
- Danim, S., Visi Baru Manajemen Sekolah, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012).
- Dauly, H.P. Pesantren, Sekolah dan Madrasah (Yogyakarta: PPs. IAIN Sunan Kalijaga, 1998).
- Hadist, A., Manajemen Mutu Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2012). Hidayat, Pengelolaan Pendidikan (Bandung: Pustaka Educa, 2010).
- Hoy, C., Improving Quality in Education, (London: Kogan, 2008).
- Hsuan -Fu Ho, Marketing mix formulation for higher education: An integrated analysis employing analytic hierarchy process, cluster analysis and correspondence analysis, (International Journal of Educational management Vol. 22 No. 4, 2008).
- Irianto & Prihatin, Manajemen Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2010).
- Kotler, Marketing Management. The Millennium Edition, (New Jesrey: Prentice-Hall International Inc, 2003).
- Miles, M. B. & Huberman, A. M, Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang MetodeMetode Baru. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2003).
- Moleong, L. J, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2003).
- Mulyasana, D., Pendiidikan Bermutu (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012).
- Rahman. Jurnal Pendidikan Islam, Nadwa, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012).

- Sallis, E., Total Quality Management In Education. Terjemahan Ahmad Ali Riyadi dan Fahrurrazi, (Jogjakarta: Pustaka, 2012).
- Steenbrink, K. A. Pesantren-Marasah-Sekolah, (Jakarta: Erlangga, 1999).
- Sudarwan, Danim, Visi Baru Manajemen Sekolah, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012).
- Wijaya, D., Pemasaran Jasa Pendidikan, (Jakarta: Salemba Empat, 2012).